

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU:

- Abu Bakar Jabr Al Jazairi. *Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim*. Jakarta. Islam Kaffah. 2005.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, diterjemahkan Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Abu Sura'I Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam*. Yogyakarta. Al Ahlis. 1993.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta. Sinar Grafika. 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*.
- H. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Imran Nating. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan pemberesan Harta Pailit*. Jakarta. Rajawali Pers. 2004.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajagrafindo Press. 2003.
- Munir Fuady. *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek*. Cet. Ke-IV, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- R. Subekti. *KUHPerdata*. Jakarta. Jakarta. Balai Pustaka. 2009.
- Rudhy A. Lontoh (Ed). *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung. Alumni. 2001.
- Subulus Salam. Darul 'Ashimah, tahqiq Thariq bin 'Awadhullah bin Muhammad. Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1995.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*. Bandung: Alumni. 1999.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Cet. IV. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2010.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 11 September 2014, No. 67/PUU-XI/2103.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/ Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban.

## **INTERNET:**

Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. 5 Februari 2015. *Upah Buruh Vs Utang Pajak mana Yang Didahulukan Pembayarannya*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20492-upah-buruh-vs-utang-pajak,mana-yang-didahulukan-pembayarannya>.